

BAB III

PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Pangan Di Desa Bangunjiwo Tahun 2015

Dalam bab ini akan membahas penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang terdiri dari partisipasi, transparansi, efektivitas, akuntabilitas. Dari keseluruhan prinsip-prinsip tersebut tentunya mempunyai indikator-indikator tersendiri, sehingga bisa menjadi acuan untuk menilai bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan berikut ini penjelasannya:

1. Partisipasi

Prinsip partisipasi merupakan ketelibatan semua masyarakat baik dalam suatu proses pembangunan fisik atau nonfisik yang sedang berjalan khususnya disuatu pemerintahan. Menurut UNDP dan LAN dalam Tangkilisan (2005:115) partisipasi merupakan keterlibatan setiap warga negara yang mempunyai kesempatan yang sama untuk membeikan aspirasi langsung maupun tidak lanngsung kepada pemerintahan untuk mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dari pernyataan diatas bisa dikatakan partisipasi khususnya partisipasi masyarakat merupakan tiang utama keberhasilan suatu pembangunan. Dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan keberhasilan suatu program yang sedang berjalan yaitu terjlinnya kerjasama antara

atasan dan bawahan itu berarti kerjasama antara pemerintahan dan masyarakat, maupun sektor swasta. Masyarakat juga memegang peran penting dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah seperti contohnya yaitu dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan di Desa Bangunjiwo.

Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan di Desa Bangunjiwo bisa dikatakan baik, dengan ditandai dengan keikutsertaan semua masyarakat dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan. Bisa dilihat dari wawancara pekan lalu dengan Kepala Seksi Kesejahteraan pada tanggal 7 Januari 2018 yang mengatakan bahwa:

“Sudah semua masyarakat terlibat dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan, ditandai dengan adanya 4 (empat) Kelompok Afinitas, dan 16 (enam belas) Kelompok GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani). Kelompok Afinitas disini juga bermacam-macam jenis usahanya akan tetapi juga masih dalam lingkup Desa Mandiri Pangan.”

Dan ditambah lagi dengan wawancara dengan kepala Dukuh Bibis Bapak Sunardi pada tanggal 10 Januari 2018 ketika menanyakan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan, berikut ini penuturannya:

“Kalo semuanya tidak, karena tidak semua masyarakat mempunyai lahan pertanian akan tetapi sebagian besar ikut dan di setiap RT terwakili sebanyak 90% ikut kelompok tani, sedangkan kalo kelompok usah produktif banyak dan bermacam-macam jenis usahanya.”

Dari kedua wawancara tersebut menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat Desa Bangunjiwo untuk mewujudkan Desa Mandiri Pangan sudah berjalan. Dengan adanya Kelompok Afinitas sebanyak 4 kelompok dan kelompok GAPOKTAN sebanyak enam belas kelompok yang masing-masing tersebar diberbagai Dusun di

Desa tersebut. Dari kelompok Afinitas dan Kelompok GAPOKTAN tersebut memiliki jumlah anggota yang berbeda-beda. Jadi dari kedua kelompok tersebut bisa menilai bagaimana partisipasi masyarakat Desa Bangunjiwo dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan.

Keberadaan kelompok-kelompok tersebut bisa mendorong pemerintah untuk mudah menjalankan suatu program karena tanpa adanya partisipasi masyarakat apapun yang direncanakan tidak akan berhasil. Keberadaan Kelompok Afinitas dan Kelompok GAPOKTAN sangat membantu keberhasilan Desa Mandiri Pangan tersebut. Program yang dicetuskan pertamakali dari Bupati Bantul pada masanya tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi dari masyarakat Desa Bangunjiwo. Yang *pertama* dilihat dari keterlibatan Kelompok Afintias. Berikut ini tabel daftar kelompok Afinitas yang ada di Desa Bangunjiwo:

Tabel 3. 1 Kemmpok Afinitas di Desa Bangunjiwo 2015

No	Nama Kelompok	Alamat	Tanggal Berdiri	Ketua	Anggota
1	Saka Mukti I	Kalirandu	25 Mei 2010	Paijo	110 orang
2	Saka Mukti II	Kalangan	-	Sukinah	38 orang
3	Saka Mukti III	Donotirto	11 Mei 2013	Poniran	11 orang
4	Saka Mukti IV	Kalipucang	21 Mei 2013	Titik S	15 orang

Sumber: Profil Desa Mandiri Pangan Desa Bangunjiwo

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pertama kali pembentukan kelompok Afinitas di Desa Bangunjiwo dimulai pada tahun 2010 atau sebelum adanya program

Desa Mandiri Pangan Di Desa tersebut. Pertama Kelompok Afinitas berada di Dusun Kalirandu yang bernama Saka Mukti I dan sampai tahun 2015 beranggotakan 110 orang. Yang kedua kelompok Afinitas di dusun Kalangan yang bernama Saka Mukti II yang beranggotakan 38 orang. Yang ketiga kelompok Afinitas Saka Mukti III di dusun Donotiro yang berdiri pada tahun 2013 atau setelah adanya program Desa Mandiri Pangan yang beranggotakan sebanyak 11 orang. Dan yang ke empat Saka Mukti IV yang berada di dusun Kalipucang yang berdiri pada tahun 2013 dan beranggotakan sebanyak 15 orang. Dari keseluruhan Kelompok Afinitas yang berada di Desa Bangunjiwo tersebut mempunyai usaha ekonomi produktif yang bermacam-macam jenisnya.

Pada tanggal 9 April 2012 Pemerintah Desa Bangunjiwo memberntuk Lembaga Keuangan Desa (LKD) yang bernama LKD “Suko Rahayu” yang bertempat di kantor Desa Bangunjiwo. Selain sebagai syarat utama pembentukan Desa Mandiri Pangan fungsi LKD tersebut sebagai pemberi modal kepada kelompok Afinitas maupun kelompok GAPOKTAN. Pemberian pinjaman bertujuan menyukseskan usahanya sehingga bisa meningkatkan tarah hidup masyarakat. Pinjaman di LKD “Suko Rahayu” bisa digunakan dalam kegiatan usaha dalam bidang *on fram*, *off fram*, *non fram*, melalui pinjaman berbunga sangat rendah. Seperti penuturan Kepala Seksi Kesejahteraan pada tanggal 7 Januari 2018 yang mengatakan bahwa:

“Keberadaan LKD Suko Rahayu sangat membantu banget, masyarakat bisa meminjam dengan bunga yang sangat rendah sekali, dan dari tahun ketahun itu semakin banyak, nanti bisa dilihat ada tanggal 24 dan 25 setiap bulannya

ada pertemuan di sini, itu macem-macem juga ada yang ngangsur ada yang pinjam juga. Dengan adanya LKD tersebut sangat membantu usaha masyarakat setempat sehingga tidak sedikit masyarakat yang memiliki usaha yang berkembang dengan pesat setelah adanya bantuan dana melalui LKD Suko Rahayu.”

Dari penuturan Bapak Andoyo selaku Kepala Seksi Kesejahteraan diatas keberadaan LKD “Suko Rahayu” sangat penting ditambah lagi dengan antusias masyarakat Desa yang banyak meminjam modal di LKD tersebut. Pembentukan LKD memberikan manfaat yang sangat besar untuk masyarakat sekitar, baik itu kelompok Afinitas maupun kelompok GAPOKTAN. Dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat Desa Bangunjiwo dalam menyambut program Desa Mandiri Pangan ini sangat baik dengan keterlibatan masyarakat secara langsung.

Yang kedua partisipasi dari Kelompok GAPOKTAN yang ada di Desa Bangunjiwo. Berikut ini penuturan Bapak Dulah selaku ketua Gapoktan serta tokoh masyarakat pada tanggal 10 Januari 2018:

“Partisipasi masyarakat disini bagus, dengan diadakan pertemuan setiap Selasa Wage itu semua kepengurusan GAPOKTAN berkumpul di Balai Desa. Disana kita membahas tentang kendala-kendala yang dihadapi setiap kelompok, masa tanamnya itu gimana, bantuan-bantuan dari pemerintah, dan masih banyak lagi. Intinya semua pembahasan tentang bidang pertanian. Selain kelompok GAPOKTAN, juga diadakan kumpul-kumpul setiap kelompok tani yang jmlahnya 16 kelompok tadi. Dan kelompok saya sendiri kumpul-kumpul kesemua anggota pada malam Kamis Pahing, itu semua anggota kelompok saya. Setiap pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Pak Lurah dan Kepala Seksi Kesejahteraan, tenaga pendamping, dan PPL (Penyuluh Pertanian lapangan), terkadang ada orang dari dinas juga.”

Kelompok GAPOKTAN juga berpartisipasi langsung dalam menyelesaikan Desa Mandiri Pangan di Desa tersebut. Dilihat dari wawancara diatas dengan ketua GAPOKTAN selaku tokoh masyarakat Desa Bangunjiwo yang mengatakan bahwa

partisipasi masyarakat desa tersebut sangat baik. Selain berkumpul dengan semua ketua Kelompok GAPOKTAN yang ada di Desa Bangunjiwo, Bapak Dulah mengatakan juga ada sesi berkumpul dengan semua anggota kelompoknya sendiri, dimana hari pertemuan masing-masing kelompok berbeda-beda. Pertemuan tersebut bertujuan ingin menyatukan idea atau gagasan khususnya di dunia pertanian sehingga mendapatkan jalan keluar dari suatu masalah. Tidak hanya itu saja dipertemuan tersebut juga membahas seputar bantuan yang akan diberikan oleh Pemerintah dan sekaligus pembahasan tentang masa tanam yang selalu serentak karena intruksi dari pemerintah kabupaten masa tanam di Bangunjiwo akan serentak. Diharapkan dengan masa tanam serentak bisa mengurangi hama yang mengganggu tanaman. Berikut ini tabel kelompok GAPOKTAN yang ada di Desa Bangunjiwo:

Tabel 3. 2Kelembagaan kelompok Tani tahun 2015

No	Nama Kelompok	Dusun	Jumlah Anggota	Tanggal Berdiri	Hari Pertemuan
1.	Marsudi Asih	Bibis	70 orang	8 Desember 1995	Kamis Paing
2.	Saka Tani	Kalangan	90 orang	6 Maret 1989	Minggu kliwon
3.	Sido Maju	Gedong	143 orang	3 April 1999	Wage
4.	Ngudi Rejeki	Kenalan	70 orang	15 November 1990	Incidental
5.	Tani Mulyo	Kalirandu	85 orang	4 Januari 1997	Kamis legi
6.	Morodadi	Ngentak	125 orang	21 Maret 1987	Sabtu pahing
7.	Sribitan	Sribitan	18 orang	1978	Incidental
8.	Ngudi Mulyo	Donotirto	130 orang	1987	Sabtu pon
9.	Ngudi Lestari	Jipangan	80 orang	1 Januari 1987	Minggu pahing
10.	Tani Lestari	Kalipucang	84 orang	3 Maret 1996	Tiap tanggal 8
11.	Tani Binangun	Salakan	30 orang	25 Mei 2003	Minggu pon
12.	Manunggal Karya	Petung	90 orang	3 Januari 1992	Sabtu pahing
13.	Subur Makmur	Gendeng	91 orang		Incidental
14.	Akardi	Lemahdadi	29 orang	17 April 2007	Selasa wage
15.	Sambirejo	Sambikerep	89 orang	1990	Incidental
16.	Pingin Maju	Bangen	40 orang	16 Oktober 1996	Senin wage
17.	Gapoktan “Suka Makmur”	Bibis	17 kelompok		Selasa Pon (19.00)

Sumber: Kantor Desa Bangunjiwo

Dalam penjelasan indikator partisipasi yang berada di bab I, penerapan prinsip *good governance* khususnya partisipasi sudah terjalin dengan baik. Keterlibatan semua masyarakat yang berbentuk kelompok baik itu kelompok Afinitas maupun kelompok GAPOKTAN. Selain itu partisipasi Pemerintah Desa juga sudah terjalin dibuktikan pada setiap pertemuan kelompok GAPOKTAN di Balai Desa dihadiri oleh Lurah Bangunjiwo, Kepala Seksi Kesejahteraan, dan Pendamping Desa Mandiri Pangan. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikananpun juga ikut berpartisipasi dalam forum pertemuan tersebut, meskipun tidak selalu hadir karena terkendala dengan jaraknya yang cukup jauh. Dalam Lembaga Keuangan Desa (LKD) Bapak Andoyo selaku kaur Kesejahteraan juga terlibat dengan jabatan sekretaris LKD dan ikut mengurus pinjam meminjam uang dalam bidang *on fram, off fram, non fram*, di Desa Bangunjiwo.

2. Transparansi

Transparansi merupakan terjalinnya akses informasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait dengan informasi yang akuntabel dan dapat tepat waktu baik dari pemerintah kepada masyarakat ataupun sebaliknya. Menurut UNDP dan LAN dalam Tangkilisan (2005:115) transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi secara langsung dan dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan, informasi yang didapat harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. Artinya, transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan untuk kemudian dapat dipantau oleh semua orang.

Oleh karena itu, perlu diingat bahwa informasi ini bukan sekedar tersedia, tetapi juga harus akuntabel, tepat waktu dari pemerintah kemasyarakat dan bisa dipahami bagi yang membutuhkan.

Penerapan prinsip *good governance* khususnya prinsip transparansi dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan di Desa Bangunjiwo belum sepenuhnya transparan. *Yang pertama* dilihat ketika pemberian pupuk atau bibit kepada setiap kelompok-kelompok GAPOKTAN, baik dari pemerintah Desa maupun Kelompok GAPOKTAN tidak membuat rincian pembukuan secara resmi. Akan tetapi, kelompok GAPOKTAN hanya memberikan informasi kepada anggotanya langsung seberapa banyak pupuk serta bibit yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Kurangnya Sumber Daya Manusia menjadi alasan utama mengapa setiap bantuan tidak dibuat laporan pembukuan sehingga jika masyarakat menanyakan tentang pupuk dan bibit juga jelas. Ditambah lagi ketika wawancara bersama Lurah Bangunjiwo Bapak Prajo ST pada tanggal 8 Januari 2018 mengatakan:

‘Untuk saat ini belum membuat laporan pemberian bantuan pupuk dan bibit, karena ketika bantuan untuk pertanian terkadang Pemerintah Kabupaten langsung turun ke ketua GAPKTAN langsung dan tidak melalui Pemerintah Desa akan tetapi terkadang juga melalui Pemeintah Desa. Sehingga Pemerintah Desa juga kesulitan membuat laporan karena bantuan-bantuan tersebut tidak sepenuhnya lewat pemerintahan Desa. Tapi kalo bantuan peralatan pertanian ada laporannya.’

Dari pernyataan tersebut Pemerintah Desa juga kebingungan ketika akan membuat laporan pertanggung jawaban pemberian pupuk dan bibit karena tidak semua bantuan melalui pemerintahan Desa tetapi langsung melalui ketua GAPOKTAN yang ada. Selebihnya kelompok tani juga tidak membuat laporan

karena kurangnya SDM. Walaupun pemerintah Desa ataupun kelompok tani tidak membuat laporan. Pemerintah Desa Bangunjiwo mensiasati dengan pertemuan-pertemuan rutin yang diadakan satu bulan sekali yang dihadiri oleh seluruh ketua Gapoktan, Lurah Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan dan terkadang pembimbing dari pemerintah Kabupaten. Di forum tersebut baik dari pemerintah maupun Ketua GAPOKTAN selalu meninformasikan seputar pemberian bibit, pupuk, maupun alat-alat pertanian. Tidak cukup sampai disitu Pemerintah Desa juga transparan ketika ditanya soal pemberian bantuan peralatan pertanian. Ketika wawancara pada Kepala Seksi Kesejahteraan dengan Bapak Andoyo pada tanggal 7 Januari 2018 menuturkan:

“Pemberian bantuan kita carikan dari Pemerintah Kabupaten Bantul dan pada tahun 2015 Pemerintah Desa Bangunjiwo membantu membelikan handprayer untuk semprot yang dananya bersumber dari Dana Desa . Dan saat sekarang ini kelompok tani sudah memiliki peralatan pertanian yang bersumber dari bantuan Pemerintah Kabupaten Bantul dan dibantu dengan Dana Desa.”

Dilanjutkan dengan wawancara dengan Bapak Dulah selaku Ketua GAPOKTAN pada tanggal 10 Januari 2018 mengatakan bahwa:

‘Dalam forum resmi seperti kumpul-kumpul tiap bulannya orang dari pusat menintruksi kepada petani supaya masa tanamnya itu bareng, dengan tujuan tanamannya itu tidak terserang hama, karena kalo bareng-bareng hama juga bingung mau milih tanaman yang mana mbk jadi disini tu sudah bisa transparanlah mengenai informasi dari atas kebawah. Dan dari situlah informasi yang akurat mengenai kegiatan-kegiatan Kelompok Gapoktan di Desa Bangunjiwo ’

Dapat dilihat dari hasil wawancara tersebut aparat Pemerintah Desa Bangunjiwo tidak membuat laporan pertanggung jawaban pemberian pupuk dan bibit. Transparansi informasi yang telah dijalin melalui pertemuan setiap bulannya tersebut

menjadi kunci transpaansi kuangan maupun transparansi informasi dari Pemerintah kepada masyarakat. Akan tetapi mengenai laporan peralatan pertanian Pemerintah Desa membuat rincian banyaknya peralatan pertanian yang di bantu oleh Pemerintah Kabupaten Bantul serta dibantu juga dengan Dana Desa pada tahun 2015. Berikut ini tabel peralatan pertanian di Desa Bangunjiwo:

Tabel 3. 3Peralatan Pertanian Tahun 2015

No	Nama Alat/Mesin	Jumlah	Baik	Buruk
1.	Hand traktor	15	12	3
2.	Sprayer	45	45	0
3.	Pedal thresher	15	12	3
4.	Sabit bergerigi	410	260	150
5.	Bajak	24	24	0
6.	Garbu	28	28	0
7.	Landak/grosok	715	711	0
8.	Ani-ani	172	172	0
9.	Gilingan padi (RMU)	4	4	0
10.	Pompa air	9	9	0
11.	Alat pembuat PGPR	1	1	0

Sumber: Kantor Desa Bangunjiwo

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa peralatan pertanian di Desa Bangunjiwo dalam rangka menunjang di bidang Pertanian. Dari keseluruhan peralatan pertanian tersebut ada beberapa pemberian dari Pemerintahan Kabupaten Bantul. Dan pada tahun 2015 Pemerintah Desa memberikan 3 traktor, sprayer, pompa air yang dananya bersumber dari alokas dana Desa. Peralatan pertanian yang baik akan digunakan oleh Kelompok Tani maupun Kelompok GAPOKTAN sedangkan peralatan pertanian yang sudah buruk akan secepatnya diganti dengan yang baru. Maka dari itu, bukan tidak mungkin jika Desa Bangunjiwo bisa berhasil dalam Desa Mandiri pangan.

Yang *kedua* prinsip transparansi dalam ruang lingkup pemberian bantuan oleh kelompok Afinitas di Desa Bangunjiwo melalui LKD Suko Rahayu sudah transparan. Adanya laporan keuangan dari awal tahun 2012 ketika LKD Suko Rahayu didirikan sampai tahun 2015 ada rincian bantuan yang diberikan oleh Pemerintah DIY. Seperti laporan modal bantuan hibah yang diterima oleh Lembaga Keuangan Desa “Suko Rahayu” yang berasal dari bantuan Hibah APBN dan APBN I, simpanan anggota. Total bantuan hibah dari Pemerintah sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) berikut ini rincian tabelnya:

Tabel 3. 4 Realisasi bantuan Dana Desa Mandiri Pangan tahun 2015

No	Uraiaan	Dana Hibah (Jumlah Rp)	Tahun Terrealisasi	Asal dana
1	Kegiatan Program Desa mandiri pangan	Rp. 100.000.000	Juli 2012	APBN
2	Kegiatan program desa mandiri pangan	Rp. 50.000.000	Juni 2013	APBD I
3	Kegiatan desa mandiri pangan	Rp. 20.000.000	Juli 2014	APBD I
4	Kegiatan Desa mandiri pangan	Rp. 25.000.000	Desember 2015	APBD I
	Jumlah	Rp. 195.000.000		

Sumber: Pendamping Desa Mandiri Pangan

Dari pemaparan tabel diatas dapat dikatakan ada pertanggungjawaban keseluruhan pemberian dana bantuan untuk kegiatan Desa Mandiri pangan dari awal pemberntukan hingga akhir kegiantan. keseleruhan dana yang bersumber dari APBN dan APBD I tersebut akan dikelola oleh LKD “Suko Rahayu” untuk pinjaman oleh kelompok Afinitas maupun kelompok tani yang ada di Desa tersebut. LKD Suko Rahayu memberikan pinjaman bantuan dengan bunga rendah kepada kelompok usaha

ekonomi produktif dengan bunga hanya sebesar 1%. Harapan pemerintah dengan adanya LKD Suko Rahayu tersebut bisa melancarkan usaha masyarakat sehingga bisa berhasil mewujudkan Desa Mandiri Pangan. Akan tetapi dalam faktanya ketika ditanyakan mengenai dana yang telah turun khususnya pada tahun anggaran 2015 Pemerintah Desa Bangunjiwo tidak transparan. Seperti pada wawancara berikut ini bersama Bapak Andoyo selaku Kepala Seksi Kesejahteraan pada tanggal 8 Januari 2018:

“Menegenai rincian dana pada tahun 2015, Pemerintah Desa langsung memberikan bantuan tersebut langsung memberikan pinjaman kepada setiap Kelompok Afinitas maupun Kelompok tani. Serta sisi dari pinjaman tersebut langsung dikelola oleh Lembaga Keuangan Desa Suko Rahayu. Akan tetapi rincian dananya itu tiak ada karena kami disin tidak membuat rincian dana yang telah terpakai khususnya tahun 2015.”

Serta ditambah lagi saat wawancara dengan Bapak Paijo selaku ketua Kelompok Afinitas ketika menanyakan transparansi keuangan yang ada di Lembaga Keuangan Desa Suko Rahayu, berikut ini penuturannya pada tanggal 15 Januari 2018:

Kucuran dana pada tahun 2015 sebesar Rp 25.000.000,00 itu seluruhnya disimpan di Lembaga Keuangan Desa Suko Rahayu semuanya. Sebagian ada yang dipinjamkan kepada Kelompok Afinitas maupun Gapoktan dan sisanya katanya dikelola kelola oleh Lembaga Keuangan Desa. Akan tetapi ketika saya sebagai masyarakat rincian dana tersebut untuk apa Pemerintah Desa hanya mengatakan semua ada di LKD Suko Rahayu. Konfirmasi dari pengelola LDK seperti itu.

Dalam hasil wawancara bersama Kepala Seksi Kesejahteraan dan ketua Kelompok Afinitas di Desa Bangunjiwo adanya ketidak transparanan keuangan Lembaga Keuangan Desa Suko Rahayu. Pengurus Lembaga Keuangan Desa hanya melaporkan keadaan keuangan tanpa ada bukti fisiknya dan ketika salah satu Anggota

Kelompok Afinitas menanyakan perihal keuangan Suko Rahayu tidak ada bukti yang memperkuat. Dari pernyataan tersebut sudah bisa disimpulkan bahwa Lembaga Keuangan Desa Suko Rahayu selaku mitra yang memberikan bantuan dengan bunga 1% tersebut tidak transparan.

Untuk mengukur prinsip transparansi dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan penulis mempunyai satu indikator lagi yaitu akses informasi yang akuntabel dan tepat waktu. Indikator tersebut penting untuk mengukur transparansi informasi dari Pemerintah dan masyarakat. Seperti pada tanggal 15 Januari 2018 saat wawancara bersama Bapak Pajio selaku Ketua Afinitas:

Kalau mengenai informasi yang akuntabel dan tepat waktu udah bagus. Dilihat pada tahun 2015 melalui Kepala Desa Bapak Parja meninformasikan kepada saya mendapatkan kesempatan untuk ikut pameran di Dinas Penindustrian, Perdagangan dan Koprasi pada saat itu. Karena produk unggulan disini peyek tumpuk ya sudah pameran tersebut peyek tumpuk. Dan informasi yang dapat didapatkan dari seluruh Kelompok Afintas ketika angsuran di Lembaga Keuangan Desa serta kumpul setiap 3 bulan sekali. Dipertemuan-pertemuan tersebut bisa saling bertukar pikiran mengenai usaha yang telah digeluti. Disitulah adanya akses informasi yang akuntabel serta tepat waktu.”

Dalam penjelasan indikator transparansi, dalam penerapan prinsip *good governance* khususnya partisipasi dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan di Desa Bangunjiwo sudah bisa dikatakan baik tapi belum sepenuhnya transparan. Ditandai dengan adanya pertemuan rutin setiap satu bulan sekali yang diadakan oleh seluruh ketua GAPOKTAN maupun kelompok tani. Diformasi tersebut membahas bantuan-bantuan yang akan datang dari Pemerintah Kabupaten Bantul maupun Pemerintahan Desa sehingga semua informasi dari pemerintah ke masyarakat terjalin dengan baik.

Dengan adanya pertemuan rutin setiap bulannya Pemerintah Desa tidak membuat laporan pemasukan bantuan bibit dan pupuk untuk para petani karena terkendala oleh SDA. Berbeda dengan bantuan yang dikelola oleh LKD Suko Rahayu yang bersumber dari APBN/APBD I tersebut juga sudah dikelola akan tetapi tidak ada laporan pertanggungjawaban secara tertulis atau tetapi belum terperinci.

3. Efektivitas

Efektifitas merupakan suatu proses untuk mengukur seberapa besar target yang sudah dilaksanakan, dimana semakin besar persentase target yang dicapai maka makin tinggi efektifitasnya. Dalam hasil wawancara oleh aparat pemerintah Desa Bangunjiwo menyatakan bahwa dalam pelaksanaan program Desa Mandiri Pangan tersebut sangat efektif dibuktikan dari tahun ke tahun jumlah anggota yang meminjam di LKD Suko Rahayu bertambah serta dari hasil pertaniannya juga ikut naik. Berikut ini wawancara pada tanggal 7 Januari 2018 dengan Bapak Andoyo selaku Kepala Seksi Kesejahteraan

“Setelah exit dari Desa Mandiri Pangan pada tahun 2015, Pemerintah Desa mengupayakan pemasaran hasil produksi baik dari Kelompok Afinitas. Upaya tersebut yaitu berupa pembangunan ruko untuk memasarkan hasil usaha produktif masyarakat. Ruko yang dibangun oleh Pemerintah Desa tersebut akan digunakan Lembaga Keuangan Desa/Kelompok Afinitas menjadi gerai/market untuk memasarkan produk-produk anggota Kelompok Afinitas.”

Dari hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa meskipun program Desa Mandiri Pangan telah selesai, Pemerintah Desa tetap mengupayakan solusi untuk memasarkan hasil produktifitas masyarakat. Sebelum adanya ruko tersebut anggota Kelompok Afinitas hanya menjalin kemitraan yang berada di luar Desa Bangunjiwo

saja. Jenis usaha yang telah menjalin kemitraan diantaranya yaitu bakpia, peyek tumpuk, telur asin dan susu kedelai. Diharapkan dengan keberadaan gerai yang bersebelahan dengan Puskesmas Bangunjiwo masyarakat bisa menjual hasil produksinya selain dengan kemitraannya tersebut. Solusi tersebut bisa dinilai Efektif untuk memasarkan hasil dari Kelompok Afinitas. Jadi Kelompok Afinitas tidak hanya memasarkan disatu tempat saja akan tetapi juga memasarkan di Gerai Desa Bangunjiwo. Diharapkan dengan semai kn banyak mitra yang bekerjasama denga Kelompok Afinitas semai kn banyak juga masyarakat yang bisa meningkatkan perekonomian keluarganya.

Prinsip efektivitas dalam Desa Mandiri Pangan juga dapat dilihat dalam keikut sertaan Kelompok Afinitas yang bekerja sama dengan kelompok PKK yang tertuang dalam usaha BUMDesa Mbangun Kamulyan Desa Bangunjiwo. Melalui kegiatan ini Kelompok Afinitas maupun kelompok PKK membuat bermacam-macam snack dengan bahan-bahan lokal, untuk masyarakat maupun instansi yang membutuhkan snack untuk acara pertemuan dan rapat Desa. Dengan adanya Intruksi Bupati No. 3 Tahun 2012 tersebut baik dalam kelompok Afinitas maupun kelompok PKK bisa meningkatkan perekonimian melalui kegiatan tersebut.

Setelah penejelasan pengolahan hasil melalui Kelompok Afinitas diatas di Desa Bangunjiwo. Tingkat ke efektivitas program Desa Mandiri Pangan bisa dilihat dari Kelompok GAPOKTAN yang tujuan pembentukannya yaitu untuk peningkatan

produktifitas hasil pertanian. Seperti penuturan Bapak Dulah selaku Ketua GAPOKTAN pada tanggal 10 Januari 2018 yang mengatakan bahwa:

“Setelah adanya program tersebut sangat efektif untuk meningkatkan hasil pertanian. Dilihat dari hasil pertanian dengan adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Bantul berupa pupuk, bibit, peralatan pertanian sehingga dari hasil pertaniannya juga meningkat. Sebelum ada program tersebut petani hanya mengandalkan pupuk kandang dan hasil panennya hanya 4 ton/Ha tetapi sekarang setelah adanya program tersebut bisa mencapai 8 ton/Ha padahal kalau menurut setandar nasional hanya 7 ton/Ha.”

Dari pernyataan tersebut bisa dipastikan dari program Desa Mandiri Pangan tersebut bisa efektif untuk meningkatkan hasil pertanian warga sehingga bisa meningkatkan pendapatan warga setempat. Hasil pertanian di Desa Bangunjiwo yang melimpah tidak terlepas dari peran pemerintah Kabupaten pemerintah desa hingga masyarakat. Berikut ini tabel hasil pertanian pada tahun 2015:

Tabel 3. 5Hasil Pertanian Desa Bangunjiwo Tahun 2015

No	Tanaman	Luas lahan (Ha)	Hasil panen (Ton/Ha)
1.	Padi Sawah	294,61 Ha	8,5 Ton/Ha
2	Jagung	27,64 Ha	5,78 Ton/Ha
3.	Kedelai	2,31 Ha	2.10 Ton/Ha

Sumber: Kantor Desa Bangunjiwo

Selain hasil pertanian di Desa Bangunjiwo yang sangat melimpah, pemerintah Desa melalui Tim Pangan Desa (TPD) bekerjasama dengan pemerintah desa, penyuluh dan kelompok tani mengupayakan beberapa kegiatan yang bertujuan mengefektifkan program Desa Mandiri Pangan dengan memanfaatkan potensi yang ada di Desa Bangunjiwo. Pemerintah Desa Bangunjiwo sampai saat ini tetap

menjalankan Intruksi Bupati No 4 tahun 2012 tentang penggunaan pangan lokal dalam jamuan rapat. Itu artinya hasil pertanian desa tersebut bisa dibuat olahan berbagai macam makanan sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat serta bisa memanfaatkan hasil pertanian lokal. Selain itu berdasarkan Intruksi Bupati No.3 Tahun 2012 tentang pemanfaatan pekarangan, Pemerintah Desa juga terus mensosialisasikan kepada masyarakat diharapkan tidak ada lagi lahan pekarangan masyarakat hanya terbengkalai begitu saja.

Menurut Sedarmanti (2012:39) menatakan bahwa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang efektif harus melibatkan 3 pilar yaitu: pemerintah, sector swasta, dan masyarakat. Begitu juga dalam menjalankan Desa Mandiri pangan di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tersebut. Keterlibatan masyarakat dan pemerintah serta sector swasta sudah terjalin. Keterlinitan sector swasta bisa dilihat dari penampungan padi (gabah) milik Bapak H.Wiryono yang bernama “Gabah Lestari”, disana masyarakat bisa menjual hasil pertanian khususnya padi (gabah). Selain di “Gabah Lestari” di Desa Bangunjiwo juga memiliki Lumbung Pangan Desa yang bernama “Suka Sari”. Keberadaan Lumbung Pangan sangat membantu karena di tempat tersebut masyarakat bisa menyimpan gabahnya selama 90 hari dan bisa diambil jika membutuhkan bahkan saat kekurangan persediaan bahan pangan khususnya beras. Dengan cara-cara tersebut pada tahun 2012 dan tahun 2015 bisa mengurangi jumlah Kelurga Miskin di Desa Bangunjiwo. Berikut ini tabel penerimaan Rastra di Desa Bangunjiwo pada tahun 2015.

Tabel 3. 6Jumlah penerimaan rastra di Desa Bangunjiwo

No	Dusun	Jumlah Rumah Tangga Sasaran		Persentase penurunan per Dusun
		Tahun 2012	Tahun 2015	
1.	Bangen	149	139	6,71 %
2.	Bibis	169	153	9,47 %
3.	Donotirto	245	228	6,93 %
4.	Gendeng	253	213	15,81 %
5.	Jipangan	214	182	2,08 %
6.	Kajen	193	151	14,95 %
7.	Kalangan	139	119	14,38 %
8.	Kalirandu	205	179	12,68 %
9.	Kenalan	173	135	21,96 %
10.	Lemahdadi	230	195	15,22 %
11.	Ngentak	206	151	26,70 %
12.	Salakan	76	66	13,15 %
13.	Sambikerep	105	94	10,48 %
14.	Sembungan	114	88	22,81 %
15.	Tirto	219	171	21,92 %
16.	Gedongan	155	131	15,48 %
17.	Kalipucang	212	176	16,98 %
18.	Sribitas	43	28	34,88 %
19.	Petung	111	90	18,92 %
Jumlah		3211	2689	16,29 %

Sumber: Kantor Desa Bangunjiwo

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan Rastra di Desa Bangunjiwo mengalami penurunan. Mengapa untuk melihat tingkat kemiskinan menggunakan jumlah penerima Rastra karena jumlah penurunan tingkat kemiskinn dapat dilihat dari pemberian Rastra. Jadi jika jumlah penerima rastra tersebut berkurang maka semakin nmenurun pula jumlah tingkat kemiskinan di masyarakat. Pada tahun 2015 jumlah Keluarga Miskin yang ada di Desa Bangunjiwo telah berkurang secara segnifikan. Perbandingan tahun 2012 dan tahun 2015 mengalami

penurunan sebesar 16,25 %. Dari hasil penurunan Keluarga Miskin tersebut bisa dinilai efektif setelah adanya Desa Mandiri Pangan di Desa Bangunjiwo karena salah satu tujuan utama program tersebut yaitu untuk mengurangi Keluarga Miskin di pedesaan.

Dalam penjelasan indikator efektivitas dalam penerapan prinsip *Good Governance* dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan di Desa Bangunjiwo sudah sangat efektif. Dengan hasil pertanian yang semakin meningkat dari tahun ketahunserta ditambah dengan adanya kelompok Afinitas sehingga dapat mengurangi jumlah Keluarga Miskin di Desa tersebut. Hal ini ditunjukkan dari data penerimaan Raskin pada tahun 2012 dan tahun 2015 adanya penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 16,25%. Dengan berkurangnya Kepala Keluarga Miskin Desa Bangunjiwo merupakan salah satu keberhasilan dari Desa Mandiri Pangan.

4. Akuntabilitas

Penerapan prinsip *good governance* khususnya prinsip akuntabilitas sangat penting bagi keberlangsungan program Desa Mandiri Pangan di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Akuntabilitas merupakan sebuah pertanggungjawaban dari pemerintah kepada masyarakat dalam menjalankan suatu kegiatan. Akuntabilitas sangat penting untuk diperhatikan karena kita bisa menilai apakah dalam melaksanakan suatu kegiatan pemerintah membuat laporan pertanggungjawaban atau tidak. Seperti yang telah dijelaskan dalam prinsip transparansi di atas. Pemerintah Desa Bangunjiwo tidak sepenuhnya membuat laporan

keuangan akan tetapi ada laporan pertanggungjawaban dalam melaksanakan Desa Mandiri Pangan. Laporan yang tidak dibuat yaitu pemberian pupuk dan bibit pertanian sedangkan peralatan pertanian sudah ada pencatatan seberapa banyak peralatan pertanian yang ada di Desa Bangunjiwo. Pemerintah desa mempunyai alasan karena tidak semua bantuan melalui pemerintah Desa akan tetapi bisa langsung ke Ketua Gapoktan yang ada di Desa tersebut. Meskipun begitu masyarakat Desa Bangunjiwo sepenuhnya telah percaya oleh aparat desa karena setiap bulannya seluruh anggota Gapoktan mengadakan pertemuan rutin di balai Desa yang salah satunya membahas tentang bantuan yang akan turun dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa. Ketika prinsip akuntabilitas telah dilaksanakan maka akan mendapatkan hasil yang optimal seperti yang diinginkan pada setiap program kegiatan. Berikut ini optimalnya hasil pertanian saat wawancara pada tanggal 10 Januari 2018 dengan Bapak Dulah selaku Kelapa GAPOKTAN:

“Kalo tahun 2015 sudah sangat optimal, dengan hasil pertanian yang sangat banyak sekali yaitu padi sawah hasil panennya mencapai 8,5 Ton/Ha itu untuk tanaman pokok yang bisa 2 kali panen dalam setahun serta tanaman selingan berupa jagung mencapai 5 ton lebih / Ha dan kedelai mencapai 2 Ton/Ha. Kalau dirinci dengan hasil pertanian yang seperti itu tidak akan habis dikonsumsi oleh masyarakat. maka dari itu Pemerintah Desa membuatkan lumbung pangan untuk cadangan pangan bagi masyarakat. Di lumbung gabah tersebut masyarakat bisa menitipkan hasil pertanian khususnya gabah dan bisa diambil lagi ketika dibutuhkan.”

Dari wawancara tersebut dipastikan dengan adanya Desa Mandiri Pangan tersebut sudah ada pertanggungjawaban dari Pemerintah selaku pemberi pelayanan kepada masyarakat. Dengan hasil yang sangat melimpah dan tidak akan habis dikonsumsi oleh masyarakat setempat merupakan bukti bahwa alternatif program

tersebut dapat memberikan hasil yang optimal. Sehingga dengan hasil yang optimal tersebut bisa meningkatkan pendapatan masyarakat serta bisa mengurangi keluarga masuki di pedesaan dengan menfaatkan potensi lokal yang ada sesuai dengan tujuan utama program Desa Mandiri Pangan.

Berbeda dengan bantuan pertanian, bantuan pinjaman uang melalui LKD Suko Rahayu sudah ada laporan pertanggungjawaban tetapi belum terperinci. Pemerintah Desa hanya mencatat semua bantuan yang masuk melalui LKD Suko Rahayu dari pertama program tersebut dijalankan. Pertama kali LKS Suko Rahayu mendapatkan bantuan sebesar Rp. 100.000.000, yang kedua Rp. 50.000.000, yang ketiga 20.000.000, dan yang terakhir 25.000.000. Semua bantuan yang dikelola oleh LKD Suko Rahayu dan disalurkan kepada kelompok Afinitas maupun Kelompok Gapoktan yang berbentuk pinjaman uang berbunga rendah yaitu sebesar 1%. Dengan rincian dana yang telah diberikan, pada tahun 2015 dana tersebut dikelola oleh Lembaga Keuangan Desa Suko Rahayu. Selain untuk pinjaman modal bantuan sebesar Rp. 25.000.000,00 Pemerintah Desamelalui Kelompok Afinitas melakukan pelatihan pembuatan roti, peyek tumpuk, bakpia berikut ini penjelasan Bapak Paijo selaku Kelompok Afinitaspada tanggal 15 Januari 2018.

Pada tahun 2015 Kelompok Afinitas mendapatkan intruksi dari Kepala Desa Bangunjiwo Bapak Parja untuk mengadakan pelatihan pembuatan roti, peyek tumpuk, dan bakpia. Pembuatan roti itu dilatarbelakangi karena setiap ada hajatan atau rapat-rapat itu pasti membutuhkan jenis makanan seperti roti maka dari itu Pak Parja menyuruh saya mengadakan pelatihan. Sedangkan kalau peyek tumpuk itu karena saya termasuk juragan peyek tumpuk dan saya mendapatkan kepercayaan tersebut. Dan bakpia karena itu makanan khas dari

Jogja. Ketiga pelatihan tersebut sudah dilaksanakan pada tahun 2015 dan sekarang ini bisa dikatakan sudah bisa meningmati hasilnya.”

Dari hasil wawancara diatas menunjukkann bahwa Pemerintah Desa sudah cukup bertanggungjawa dalam pelaksanaan program Desa Mandiri Pangan. Tanggung jawab tersebut dilihat dari aksi Pemerintah Desa yang mengintruksi kepada Kelompok Afinitas supaya mengadakan pelatihan. Pelatihan tersebut tidak lain untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Bangunjiwo. Tentunya dalam melakukan pelatihan tersebut Kelompok Afinitas sangat memerlukan biaya untuk mengadakannya, berikut ini biaya yang harus dikeluarkan saat pelatihan pembuatan roti, peyek tumpuk dan bakpia:

Tabel 3. 7 Kegiatan Program Desa Mandiri Pangan Tahun 2015

No	Keterangan	Sumber dana	Dana
	Kegiatan desa mandiri pangan tahun 2015	Rp.20.000.000,00	APBD I
A.	Pelatihan pengembangan ketrampilan kelompok afinitas		
	1. Bakpia 2. Roti 3. Peyek tumpuk		
b.	Pengembangan modal di Lembaga Keuangan Desa Suko Rahayu		
	1. Simpan Pinjam		

Sumber: Kelompok Afinitas

Dalam tabel tersebut menyebutkan bahwa kegiatan Desa Mandiri Pangan pada tahun 2015 yaitu berupa pelatihan pengembangan ketrampilan Kelompok Afinitas dan pengembangan modal di LKD Suko Rahayu. Pelatihan pengembangan

keterampilan pada Kelompok Afinitas berupa pelatihan bakpia, roti, dan peyek tumpuk. Dalam kegiatan tersebut langsung didanai oleh Lembaga Keuangan Desa Suko Rahayu selaku penanam modal di Desa Bangunjiwo. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 tersebut sekarang telah mendapatkan hasilnya bagi yang mengikuti pelatihan tersebut. Anggota Kelompok Afinitas sekarang bisa lebih mandiri dalam mengembangkan usahanya serta bisa meningkatkan pendapatan keluarganya. Kemandirian tersebut dibuktikan dengan adanya kerja sama antara kelompok PKK Desa dengan Kelompok Afinitas untuk memasarkan hasil produksinya.

Tidak hanya pertanggung jawaban mengenai laporan anggaran, Pemerintah Desa Bangunjiwo terus mengupayakan Program Desa Mandiri Pangan meskipun program tersebut sudah selesai pada tahun 2015. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yaitu bisa dilihat pada tahun 2016 Desa Bangunjiwo memenangkan lomba Desa Mandiri Pangan tingkat Provinsi dan meraih juara II. Meskipun pada tahun 2015 sudah selesai program Desa Mandiri Pangan tersebut Desa Bangunjiwo masih bisa mempertahankan ketahanan pangan di tingkat Desa. Hal tersebut bisa dilinai sebagai pertanggung jawaban Pemerintah Desa untuk terus mempertahankan ketahanan Pangan melalui kegiatan Desa mandiri Pangan.

Dalam penjelasan indikator akuntabelitas dalam penerapan prinsip *good governance* dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan di Desa Bangunjiwo sudah mempertanggungjawabkan kegiatan Desa Mandiri Pangan dan alternatif program tersebut bisa memberikan hasil yang optimal. Pada tahun 2015 Kelmopak

GAPOKTAN sudah bisa meningkatkan hasil pertanian dengan rata-rata hasil pertanian diatas Setandar Nasional yang telah ditetapkan. Sehingga dengan hasil pertanian yang melimpah program tersebut bisa memberikan hasil yang optimal. Serta dalam pertanggung jawaban tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan pada tahun 2015 yaitu berupa pelatihan pengembangan ketrampilan Kelompok Afinitas. Maka dari itu dengan adanya kegiatan tersebut masyarakat bisa meningkatkan pendapatan keluarganya.

5. Keadilan

Keadilan merupakan keterlibatan semua masyarakat tanpa membeda-bedakan baik itu laki-laki dan perempuan (kesetaraan gender) mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan program Desa Mandiri Pangan haruslah bisa memperhatikan hubungan atau relasi antara laki-laki dan perempuan. Hal ini sangat penting untuk dijalankan dalam sebuah program maupun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah karena diharapkan tidak ada ketimpangan gender dalam menjalankan sesuatu. Di Desa Bangunjiwo sendiri setidaknya ada ketimpangan gender dalam menjalankan program yang di peruntungkan untuk desa rawan pangan tersebut. Seperti saat wawancara dengan Kepala Desa Bangunjiwo pada tanggal 7 Januari 2018

Dalam menjalankan program Desa Mandiri Pangan di sini secara sekilas ada ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan. Karena jika dilihat dari empat kelompok afinitas hanya sebagian kecil yang anggotanya ada laki-lakinya dan selebihnya itu perempuan semua jika di pesenin perempuannya itu mencapai 75% mendominasi di setiap kelompok tersebut. Serta pada ketika

mengadakan pelatihan pembuatan usaha pada tahun 2015 yang ikut semuanya perempuan karena kalau untuk pelatihan-pelatihan usaha itu lebih untuk peningkatan ketrampilan bagi perempuan”

Dari wawancara tersebut menyatakan bahwa keterlibatan perempuan sangat mendominasi dibandingkan laki-laki. Perempuan dinilai teliti dalam menjalankan usaha salah satunya yaitu usaha produktif yang berkaitan dengan Desa Mandiri Pangan. Dalam setiap kelompok afinitas juga lebih dominan jenis usaha yang bisa dikerjakan oleh perempuan diantaranya yaitu pembuatan telur asin, peyek tumpuk, roti, bakpia, pembuat tempe, ceriping pisang, dan pembuatan gula jawa. Jenis usaha tersebut umumnya bisa dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dirasa kurang telaten dalam menjalankan berbagai jenis usaha tersebut. Sedangkan untuk jenis usaha yang digeluti oleh kelompok laki-laki diantaranya yaitu, pedagang sayur, mebel, kerajinan tangan, bengkel dan lain sebagainya. Pekerjaan tersebut umumnya memang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan cenderung tidak bisa menjalankan jenis usaha tersebut. Berikut ini tabel perbandingan keikutsertaan laki-laki dan perempuan dalam kelompok afinitas

Tabel 3. 8 Jumlah Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kelompok Afinitas

No	Nama kelompok	Jumlah anggota laki-laki	Jumlah anggota perempuan	Jumlah anggota
1	Suka mukti I	37 orang	73 orang	110 orang
2	Suka mukti II	8 orang	30 orang	38 orang
3	Suka mukti III	4 orang	7 orang	11 orang
4	Suka mukti IV	Tidak ada	15 orang	15 orang

Sumber: kantor Desa Bangunjiwo

Dari tabel tersebut bisa dikatakan bahwa keterlibatan antara laki-laki dengan perempuan sangat jauh jumlahnya. Dalam kelompok afinitas tersebut jumlah anggota perempuan lebih banyak dari pada jumlah perempuan. Dari hal tersebut adanya ketimpangan pembagian kerja dalam kelompok afinitas, karena dalam kelompok afinitas tersebut lebih kepada peningkatan usaha produktif. Dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan program Desa Mandiri Pangan di Desa Bangunjiwo menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang cukup besar. Selain keterlibatan perempuan di desa tersebut juga telah melibatkan laki-laki ke dalam kelompok afinitas. Berbeda dengan kelompok afinitas keberadaan kelompok Gapoktan sama sekali tidak melibatkan perempuan dalam peningkatan hasil pertaniannya. Berikut ini saat wawancara dengan Bapak Dulah pada tanggal 10 Januari 2018.

“Dalam kelompok gapoktan di desa ini semua anggota kelompok terdiri dari laki-laki semuanya akan tetapi jika saat penanaman perempuan juga ikut membantu. Kalau kelompok gapoktan lebih kepada pengolahan pertaniannya makanya semua anggota terdiri dari laki-laki. Sedangkan dalam ruang lingkup Desa Mandiri Pangan kelompok perempuan itu lebih banyak di kelompok afinitas karena tupoksi kelompok tersebut lebih kepengolahan hasil lokal yang ada.”

Dalam wawancara tersebut diketahui masih terdapat bias gender dalam pemilihan anggota kelompok. Bentuk ketidakadilan gender dalam program Desa Mandiri Pangan adalah adanya pemahaman jika perempuan tidak terlalu trampil dalam peningkatan hasil pertanian. Hal ini dapat dilihat dalam pemilihan anggota kelompok Gapoktan, bahwa yang melakukan kegiatan pertanian adalah laki-laki. Namun

kenyataanya terdapat perempuan yang melakukan atau terlibat dalam aktifitas kelompok Gapoktan. Akibatnya perempuan tidak dapat akses terhadap Program Desa Mandiri Pangan yang berhubungan dalam sector pertanian. Jika setiap anggota kelompok ada ketimpangan gender maka lain pula dengan keadilan baik kelompok yang kecil dan besar atau kelompok yang lama dan kelompok yang baru seperti saat wawancara dengan Kepala Desa Bangunjiwo pada tanggal 8 Januari 2018

“Kalau masalah keadilan pemberian bantuan baik untuk kelompok lama dan baru atau kelompok yang besar dan kecil kami tidak membeda-bedakan. Karena baik lama ataupun kecil itu tetap harus diperhatikan supaya tidak ada ketimpangan antara satu kelompok dengan kelompok lain baik itu kelompok Afinitas maupun kelompok Gapoktan di Desa Bangunjiwo ini.”

Dari hasil wawancara tersebut Pemerrintah Desa tidak ada membeda-bedakan antar kelompok baik itu kelompok Afinitas maupun kelompok Gapoktan. Pemerintah Desa bisa memerlakukan keseluruhan kelompok dengan adil dan merata baik itu dalam segi pelayanannya maupun pemberian bantuan. Jadi kesimpulannya pada pelaksanaan program Desa Mandiri Pangan di Desa Bangunjiwo belum bisa merapkan prinsip keadilan karena di Desa tersebut masih ada ketimpangan gender dari segi pembagian kegiatan dalam program tersebut. Dimana kelompok Afinitas lebih banyak perempuannya lebih mendominasi dari pada laki-laki. Sedangkan keadilan dari kelompok yang kecil maupun yang baru tetap sama perlakuannya dengan kelompok besar maupun lama yang ada di desa tersebut